

# **LAPORAN KINERJA** **INSTANSI PEMERINTAH** **(LKjIP).**

 **DINKOMINFO**



**CEPAT**  
AKURASI  
MANEJ

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**KABUPATEN BLORA**  
**TAHUN 2024**

Disusun Oleh:

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI .....	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN .....	2
C. SISTEMATIKA PENULISAN .....	2
E. SUMBER DAYA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA .....	4
F. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI OLEH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BLORA .....	11
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....	13
A. PERENCANAAN KINERJA .....	13
B. PERENCANAAN KINERJA .....	15
C. PERJANJIAN KINERJA .....	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2023 .....	31
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI .....	31
C. REALISASI ANGGARAN .....	37
BAB IV PENUTUP .....	43
A. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BLORA .....	43
B. STRATEGI UNTUK PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATANG .....	44

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Komposisi Pegawai Menurut Pangkat/Golongan Ruang .....	5
Tabel 1. 2 Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan .....	6
Tabel 1. 3 Komposisi Pegawai Menurut Jabatan Struktural.....	6
Tabel 1. 5 Sarana dan Prasarana .....	7
Tabel 1. 6 Nilai Asset Dinas Komunikasi dan Informatika .....	9
Tabel 2. 1 Rencana Strategis.....	15
Tabel 2. 4 Program dan Kegiatan Pendukung Kinerja Dinas Urusan Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian.....	19
Tabel 2. 5 Perubahan Target dan Anggaran .....	26
Tabel 3. 1 Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .....	31

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blora .....	4
---	---

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat, hidayah dan karuniaNya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika (DINKOMINFO) Kabupaten Blora Tahun 2023.

LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian melalui Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing Perangkat Daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini dan untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Blora, 29 Januari 2024

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Blora



**FRAFIKTO NUGROHO, S.Sos, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19690617 199009 1 002

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI**

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blora sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai Perangkat Daerah adalah membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan Peraturan Bupati Blora Nomor 76 Tahun 2021 mempunyai tugas melaksanakan urusan sebagian tugas Bupati di Bidang Komunikasi, informatika, persandian dan Statistik.

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Blora sebagai instansi pemerintah diwajibkan menetapkan target kinerja dan melakukan pengukuran kinerja yang telah dicapai serta menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Penyusunan LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blora Tahun 2023 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun 2023, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blora pada tahun mendatang. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blora dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Target kinerja yang harus dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Blora tahun 2023 merupakan penjabaran dari visi, misi dan tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023. Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan untuk mendorong instansi pemerintah dalam meningkatkan

transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan program serta dapat menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka peningkatan kinerja instansi pemerintah. Oleh karena itu, substansi penyusunan LKjIP didasarkan pada hasil-hasil capaian indikator kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blora.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja ini adalah :

1. Sebagai bahan laporan pelaksanaan anggaran tahun 2023;
2. Sebagai bahan review untuk pelaksanaan kegiatan satu tahun kedepan.

## **C. SISTEMATIKA PENULISAN**

Adapun sistematika penulisan laporan adalah sebagai berikut :

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

KATA PENGANTAR

**BAB I PENDAHULUAN**

- A. Gambaran Umum
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Sistematika Penulisan
- D. Tugas, Fungsi dan Sturuktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blora
- E. Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blora
- F. Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blora
- G. Landasan Hukum

**BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

- A. Perencanaan Kinerja
- B. Perjanjian Kinerja



## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2023

A. Capaian Kinerja Organisasi.

B. Realisasi Anggaran

## BAB IV PENUTUP

### **D. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BLORA**

#### 1. Tugas

Pada Peraturan Bupati Blora Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blora, disebutkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bupati dibidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik.

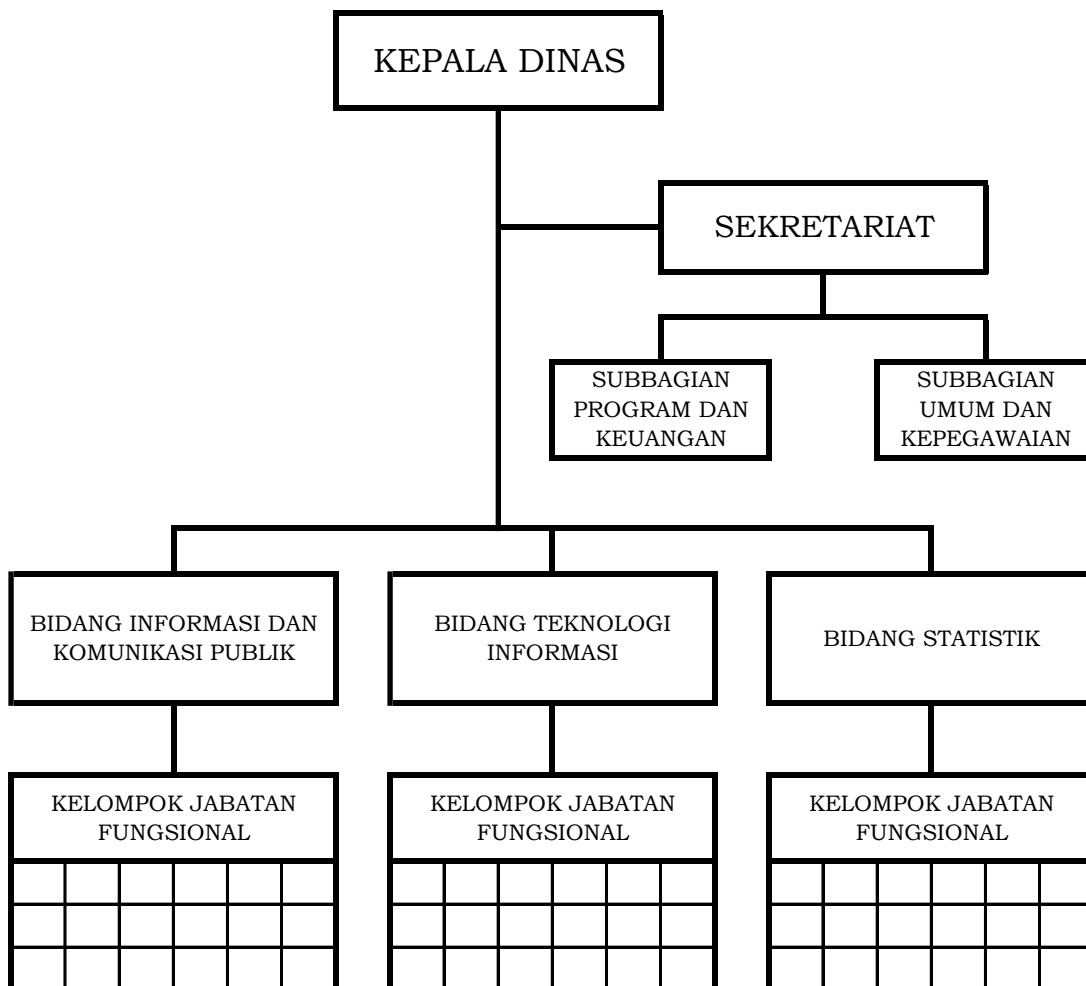
#### 2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blora mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan Kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan Evaluasi dan pelayanan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan Administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan Fungsi dan yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### 3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blora dapat dilihat pada skema berikut ini:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blora

## E. SUMBER DAYA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

### 1. Sumber Daya Manusia

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi, sangat ditentukan oleh kuantitas maupun kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, jumlah pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blora berdasar klasifikasi PNS, PPPK dan Non ASN sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Orang)
1	PNS	27
2	PPPK	13
3	Non ASN	19
JUMLAH		59

Klasifikasi Golongan PNS dan PPPK Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai berikut :

Tabel 1. 1 Komposisi Pegawai Menurut Pangkat/Golongan Ruang

No	Pangkat	Golongan Ruang	Jumlah (Orang)
1	Pembina Utama Muda	IV/c	1
2	Pembina Tingkat I	IV/b	2
3	Pembina	IV/a	5
4	Penata Tingkat I	III/d	6
5	Penata	III/c	2
6	Penata Muda Tingkat I	III/b	1
7	Penata Muda	III/a	5
8	Pengatur Tingkat I	II/d	1
9	Pengatur	II/c	2
10	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	2
11	Pengatur Muda	II/a	2
12	Juru Tingkat I	I/d	-
13	Juru	I/c	-
14	Juru Muda Tingkat I	I/b	-
15	Juru Muda	I/a	-
16	Penata Muda	IX	11
17	Pengatur	VII	2
<b>Jumlah</b>			<b>40</b>

Kualifikasi Pendidikan PNS dan PPPK Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai berikut :

Tabel 1. 2 Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	Doktor	1
2	Pasca Sarjana (S2)	6
3	Sarjana (S1)	24
4	Diploma	4
5	SLTA	4
6	SD	1
<b>Jumlah</b>		<b>40</b>

Pejabat Struktural pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blora dapat dijelaskan pada table di bawah ini :

Tabel 1. 3 Komposisi Pegawai Menurut Jabatan Struktural

No	Jabatan Struktural	Pangkat/Gol. Ruang	Jumlah (Orang)
1	Kepala Dinas	Pembina Utama Muda (IV/c)	1
2	Sekretaris	Pembina Tk.I (IV/b)	1
3	Kepala Bidang Statistik	Pembina (IV/a)	1
4	Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik	Pembina (IV/a)	1
5	Kepala Bidang Teknologi Informasi	Pembina (IV/a)	1
6	Ka. Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian	Pembina (IV/a)	1
7	Ka. Sub. Bag. Program dan Keuangan	Penata Tk.I (III/d)	1
<b>Jumlah</b>			<b>7</b>

## 2. Sarana dan Prasarana

Guna mendukung tugas pokok dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blora memiliki sarana dan prasarana pendukung yang secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. 4 Sarana dan Prasarana

No	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
1	Bangunan Gedung	1	1 Ruang Kepala, 7 Ruang Kerja, 1 Ruang Rapat, 1 Ruang Mushola, Gudang, LPPL Gagak Rimang dan Data Center
2	Kendaraan Dinas	23	
	a. Kendaraan Roda 4 (empat)	7	
	b. Kendaraan Roda 2 (dua)	18	
3	Mesin Ketik Manual	4	
4	Mesin Ketik Elektronik	2	
5	AC	18	
6	TV Berwarna	7	
7	Projector	1	
8	Equaliser	2	
9	Scanner	2	
10	Kipas Angin	2	
11	Kamera Video	23	
12	Mainframe Komputer Jaringan	9	
13	Almari Kayu dan Besi	13	
14	Papan Nama Instansi	1	
15	Filling Cabinet	1	
16	Almari Makan	1	
17	Meja Kerja	40	
18	Meja Rapat	14	

<b>No</b>	<b>Jenis Barang</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Keterangan</b>
19	Meja Komputer	29	
20	Kursi Rapat	59	
21	BangkuTunggu	7	
22	Pesawat Telepon	4	
23	Fax	3	
24	Printer	24	
25	Mesin Absensi	3	
26	Genset	1	
27	Pompa Air	1	
28	Amplifier / Sound System	3	
29	PC	50	
30	Sound System	6	
31	Notebook	10	
32	Digital Thermometer	1	
33	Laptop	29	
34	Peralatan Jaringan	15	
35	Komputer Jaringan	9	
37	Mesin Absenensi	5	
36	Mesin Penghancur Kertas	2	
37	Miniatur Gedung Kantor	1	
38	Papan Nama Instansi	1	
39	LCD	2	
40	Sofa	1	
41	Mikrofon	1	
42	Tripod Kamera	2	
43	Peralatan Studio	1	
44	Drone	1	

Adapun nilai aset yang menjadi sarana dan prasarana Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blora sebagai berikut :

Tabel 1. 5 Nilai Aset Dinas Komunikasi dan Informatika

No.	Jenis	Nilai (Rp.)
1	Tanah	1.308.000.000,00
2	Peralatan dan Mesin	8.155.075.345,00
3	Gedung dan Bangunan	4.378.506.049,00
4	Jalan Irigasi, dan Jaringan	1.431.952.300,00
5	Aset Tetap Lainnya	0,00
6	Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)	59.498.000,00
7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(6.804.542.527,73)
8	Aset Lainnya	25.241.000,00
	<b>Total Nilai</b>	<b>8.553.730.166,27</b>

### 3. Fungsi Strategis

Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi Kabupaten Blora dimaksud, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blora secara umum memiliki Fungsi strategis dalam pencapaian Misi pertama Bupati (Mewujudkan pemerintah yang efektif bersih KKN, dan demokratis melalui reformasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik) yaitu: **Peningkatkan kapasitas Aparatur Daerah dalam pengelolaan jaringan dan pemanfaatan aplikasi E-Government lingkup Pemerintah Daerah.**

Secara singkat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blora memiliki mandat yang harus dipertanggung jawabkan berkaitan pengelolaan Penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik di lingkup Pemerintah Daerah, yaitu :

- 1) Bidang Informasi Komunikasi Publik
  - a) Mengoptimalkan penyelenggaraan komunikasi, informasi dan media massa bagi masyarakat;
  - b) Membangun sistem informasi manajemen pemerintah daerah untuk penyebaran informasi pembangunan daerah;
  - c) Meningkatkan kualitas SDM dibidang komunikasi dan informasi guna mengoptimalkan ketrampilan dan keahlian dalam hal penggunaan dan pengembangan teknologi informasi;
  - d) Mengoptimalkan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah guna meningkatkan sistem informasi mamajemen dan jalinan kerjasama dengan media massa.
  
- 2) Bidang Teknologi dan Informasi
  - a) Mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan publik dengan pengembangan dan pemberdayaan teknologi informasi komunikasi;
  - b) Membangun sistem informasi managemen Pemerintah Daerah agar masyarakat memperoleh informasi secara mudah, cepat dan tepat tentang prosedur pelayanan baik;
  - c) Peningkatan kinerja pelayanan publik yang pengelolaannya berbasis teknologi informasi dan komunikasi atau *E-Government*;
  - d) Memfasilitasi Organisasi Perangkat Daerah dalam peningkatan kinerja pelayanan publik berbasis *E-Government*.
  
- 3) Bidang Statistik
  - a) Mengoptimalkan pengelolaan dan penyelenggaraan data dan statistik daerah sebagai bahan informasi perkembangan pelaksanaan kegiatan;



- b) Mengoptimalkan pengelolaan, pemanfaatan dan pengembangan kompetensi SDM sandi untuk keamanan informasi persandian serta pengamanan informasi persandian serta pengamanan terhadap administrasi, pengembangan informasi dan dokumen alat-alat sandi;
- c) Mengoptimalkan penertiban kegiatan pagelaran jaringan komunikasi dan memfasilitasi antara pengusaha jasa telekomunikasi dengan perangkat daerah terhadap permasalahan-permasalahan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah-masalah.

## **F. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI OLEH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BLORA**

Permasalahan utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blora adalah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya perangkat daerah yang menerapkan sistem teknologi komunikasi dan informasi berbasis elektronik (*elektronik Government / e-Gov*);
2. Belum optimalnya pengelolaan website aktif pada masing-masing perangkat daerah;
3. Masih rendahnya SDM yang berkompeten dalam bidang teknologi komunikasi dan informasi;
4. Belum optimalnya penyebaran data dan informasi pembangunan daerah kepada masyarakat;
5. Lemahnya ketersediaan data guna menunjang pembangunan pada masing-masing perangkat daerah;
6. Terbatasnya kapasitas SDM pengelolaan persandian.

## **G. LANDASAN HUKUM**

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, bersih, transparan dan bertanggungjawab, maka Landasan hukum dalam penyusunan Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blora Tahun 2023 yaitu :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 3);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021-2026;
6. Peraturan Bupati No. 22 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Blora Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021-2026;
9. Peraturan Bupati Blora Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2023;

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **A. PERENCANAAN KINERJA**

##### **1. VISI**

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Blora Tahun 2021 – 2026 adalah :

**“Sesarengan mBangun Blora : Unggul dan Berdaya Saing”**

Visi tersebut merupakan kelanjutan dari visi sebelumnya dengan melanjutkan misi dan program yang belum tercapai secara optimal.

Berdasarkan visi tersebut, diharapkan seluruh elemen masyarakat Blora (termasuk didalamnya unsur pemerintah daerah) lebih mengoptimalkan seluruh kapasitas yang dimilikinya untuk mewujudkan masyarakat Blora yang sejahtera dan bermartabat. Penjelasan visi tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Pembangunan dilaksanakan secara bersama-sama, bahu membahu, dengan mengoptimalkan seluruh potensi dan kapasitas yang dimiliki dengan dukungan seluruh masyarakat dan stakeholder sehingga kondisi Kabupaten Blora lebih unggul dibandingkan dengan daerah lain, dengan memanfaatkan segala potensi lokal.
- b. Dan berdaya saing yaitu kemampuan dan kekuatan untuk bersaing dengan daerah lain dengan memanfaatkan keunggulan komparatif dan kompetitif.

Berdasarkan visi dan misi pembangunan jangka menengah Tahun 2021 - 2026 tersebut diatas, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blora sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah memiliki fungsi strategis karena mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.

## 2. MISI

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blora memiliki fungsi strategis dalam pencapaian Misi Bupati ketiga yaitu Mewujudkan birokrasi yang profesional, progresif, bersih dan akuntabel yaitu : **Peningkatkan kapasitas Aparatur Daerah dalam pengelolaan Jaringan dan Pemanfaatan aplikasi *E-Government* lingkup Pemerintah Daerah.**

Secara singkat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blora memiliki tugas yang harus dipertanggung jawabkan dalam kaitannya pengelolaan jaringan dan pemanfaatan aplikasi *E-Government* lingkup Pemerintah Daerah, yaitu:

- a. Peningkatan perangkat daerah yang menerapkan sistem teknologi komunikasi dan informasi berbasis elektronik (*electronic Government/e-Gov*);
- b. Peningkatan pengelolaan sistem informasi pada masing-masing perangkat daerah;
- c. Peningkatan SDM yang berkompeten dalam bidang teknologi komunikasi dan informasi;
- d. Peningkatan penyebarluasan data dan informasi pembangunan daerah kepada masyarakat;
- e. Peningkatan ketersediaan data guna menunjang perencanaan pembangunan pada masing - masing perangkat daerah;
- f. Peningkatan kapasitas SDM pengelola sandi dan telekomunikasi.

## 3. TUJUAN

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan sarana prasarana berbasis teknologi;
- b. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan telekomunikasi;
- c. Meningkatkan penyediaan data statistik daerah;
- d. Meningkatkan pengamanan informasi dengan sandi.

## 4. SASARAN

- a. Meningkatnya penerapan *e-government*
- b. Meningkatnya pengembangan Satu Data Blora

## 5. IKU

Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blora 2016-2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. 1 Rencana Strategis

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya penerapana sistem pemerintahan berbasis elektronik		Indeks SPBE	Nilai	2,96	3	3,05	3,1	3,15
		1.1 Meningkatkan Penerapan e-government	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Skor	72 (Tahap 3)	73 (Tahap 3)	74 (Tahap 4)	76 (Tahap 4)	81 (Tahap 4)
			Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Portal	5	5	5	5	5
		1.2 Meningkatnya Pengembangan Satu Data Blora	Persentase ketersediaan data pada portal satu data daerah	%	25	37	44	49	54

### B. PERENCANAAN KINERJA

Dinas Komunikasi dan Informatika bertujuan untuk mendukung perwujudan masyarakat Blora yang lebih sejahtera dan bermartabat sejalan dengan visi RPJMD 2021-2026. Tujuan, Sasaran dan Program Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blora kurun waktu 2021-2026 sebagai berikut :

Tabel 2.2

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2023
1	Meningkatnya penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik			Indeks SPBE	Indeks	3,00
		1.1	Meningkatnya penerapan e-government	Nilai keterbukaan informasi publik	Skor	73
				Pengamanan informasi pemerintah daerah	Portal	5
		1.2	Meningkatnya pengembangan satu data Blora	Persentase ketersediaan data pada portal satu data daerah	%	45

Tabel 2.3

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya penerapana sistem pemerintahan berbasis elektronik		Indeks SPBE	Nilai	2,96	3	3,05	3,1	3,15
		1.1 Meningkatkan Penerapan e-government	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Skor	72 (Tahap 3)	73 (Tahap 3)	74 (Tahap 4)	76 (Tahap 4)	81 (Tahap 4)
			Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Portal	5	5	5	5	5
		1.2 Meningkatnya Pengembangan Satu Data Blora	Persentase ketersediaan data pada portal satu data daerah	%	25	37	44	49	54

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blora Tahun 2023 merencanakan 5 Program dalam 12 kegiatan dan 35 Sub kegiatan. 5 Program yang dilaksanakan terdiri dari 1 Program yang bersifat rutin dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja pelayanan OPD dan 4 Program bersifat teknis yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blora. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH, dengan 7 kegiatan yaitu :
  - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
  - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
  - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  
2. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK, dengan 1 kegiatan yaitu :
  - a. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

3. PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA, dengan 2 kegiatan, antara lain :
  - a. Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  - b. Pengelolaan E- government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
4. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL, dengan 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan, antara lain :
  - a. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
5. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI, dengan 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan, antara lain :
  - a. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

### **C. PERJANJIAN KINERJA**

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah:

- a. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
- b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;

- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- d. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
- e. Sebagai dasar dalam perjanjian sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bloro Tahun 2023 dijabarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2023 meliputi program dan kegiatan guna mencapai sasaran sesuai dengan program kegiatan dan indikator keberhasilan pencapaiannya dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil. Adapun Perjanjian Kinerja dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bloro yang merupakan ikhtisar rencana kinerja yang akan dicapai sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dan evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2023 dijabarkan pada lampiran Perjanjian Kinerja setelah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bloro setelah APBD Perubahan yang tercantum pada Tabel 2.4

Tabel 2. 4 Perjanjian Kinerja Kepala Dinkominfo

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2023
1	Meningkatnya penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik			Indeks SPBE	Indeks	3,00
		1.1	Meningkatnya penerapan e-government	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Skor	73
				Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Portal	5
1.2	Meningktanya Pengembangan Satu Data Bloro	Persentase ketersediaan data pada portal satu data daerah	%	45		



Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bora Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 5 Program dan Kegiatan Pendukung Kinerja Dinas Urusan Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian

<b>NO</b>	<b>PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>TARGET KINERJA</b>	<b>ANGGARAN Rp.</b>
<b>1</b>	<b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi</b>	<b>40%</b>	<b>1.235.000.000</b>
	<b>Pengelolaan Informasi dan Komunkasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Desiminasi Informasi Pemerintah Daerah melalui berbagai media dengan penerapan teknologi dan informatika</b>	<b>80%</b>	<b>1.235.000.000</b>
	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah advetorial yang terpublikasikan lewat media cetak	6 kali	465.000.000
	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah banner/baliho yang terpasang	29 buah	390.000.000
	Layanan Hubungan Media	Jumlah media massa yang bersinergi dengan pemerintah daerah	60 Media	330.000.000

	Penguatan Tata Kola Komisi Informasi di Daerah	Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 16.10.2.(a)	1 badan publik	50.000.000
<b>2</b>	<b>PROGRAM APLIKASI DAN INFORMATIKA</b>	<b>Persentase OPD yang terhubung akses internet yang disediakan Dinas Kominfo</b>	<b>16%</b>	<b>955.800.000</b>
	<b>Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase OPD yang terkoneksi dengan jaringan DINKOMINFO</b>	<b>100%</b>	<b>616.800.000</b>
	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah alokasi bandwidth internet	400 Mbps	616.800.000
		Jumlah OPD terkoneksi dengan jaringan DINKOMINFO	3 OPD	
		Jumlah titik lokasi free wifi	1 Titik Lokasi	
	<b>Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Blora</b>	<b>100%</b>	<b>339.000.000</b>

	Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	Jumlah perangkat data center yang diadakan atau diupgrade	10 unit	113.200.000
	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintah Berbasis Elektronik	Jumlah OPD yang dikoordinasikan sistem keamanan informasinya	100%	95.000.000
	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah			50.800.000
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE			80.000.000
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	<b>Persentase ketersediaan data pada portal Satu Data daerah</b>	<b>25%</b>	<b>194.490.000</b>
	<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase keterisaan open data dan satu data</b>	<b>20%</b>	<b>194.490.000</b>
	Koordinasi dan Sinkronasi Pengumpulan, Pengelolaan, Analisis dan Diseminasi Data Stastik Sektoral	Jumlah data yang terupload/terupdate dalam open data dan satu dataJumlah dokumen informasi data statistik daerah kepada masyarakat	50 dataset	97.430.000

	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi			97.060.000
<b>4</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAN PERSENDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	<b>Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah</b>	<b>5 portal</b>	<b>93.500.000</b>
	<b>Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang diamankan dengan sertifikat elektronik</b>	<b>35%</b>	<b>93.500.000</b>
	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			10.000.000
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik			57.500.000
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Aplikasi OPD yang telah dilayani keamanan informasinya	5 Aplikasi	26.000.000
<b>5</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah di SKPD</b>	<b>100%</b>	<b>6.749.153.516</b>

	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah.</b>	<b>Persentase penyusunan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD</b>	<b>100%</b>	<b>2.176.000</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	916.000
	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Dokumen	1.260.000
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan administrasi keuangan PD</b>	<b>100%</b>	<b>3.400.560.000</b>
	Penyusunan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 orang	3.363.000.000
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	37.560.000
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD</b>	<b>100%</b>	<b>1.299.108.516.000</b>

	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	200 orang	1.299.108.516.000
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>100%</b>	<b>658.677.000</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	7.000.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	331.500.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	112.796.000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	16.402.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	27.760.000
	Penyelenggaraan Rapat dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	10 laporan	163.219.000

		Konsultasi SKPD		
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan barang milik daerah</b>	<b>100%</b>	<b>24.000.000</b>
	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	1 paket	24.000.000
	<b>Penyediaan Jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>100%</b>	<b>900.112.000</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	3.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	165.900.000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan	11.000.000
	Penyedia Jasa Pelayanan Umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	720.212.000
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjangn Urusan Pemerintah</b>	<b>Persentase terpeliharanya Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>100%</b>	<b>464.520.000</b>

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 unit	102.920.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 unit	11.600.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	350.000.000
Total Anggaran		<b>9.227.943.516</b>	<b>9.227.943.516</b>

Guna mewujudkan kinerja yang telah ditetapkan, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blora telah melaksanakan 5 (lima) Program, 11 (sebelas) Kegiatan dan 35 (tiga puluh lima) sub-Kegiatan yang didukung oleh APBD Kabupaten sebesar Rp.9.227.943.516,00.

Selama Tahun 2023 terjadi perubahan dalam APBD Kabupaten Blora, yaitu sebanyak 1 (satu) kali. Pertama karena perubahan APBD, yang berpengaruh terhadap Akutabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika. Perubahan Target Kinerja dan Anggaran pada Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 2. 6 Perubahan Target dan Anggaran

Sub-Kegiatan	Target		Anggaran	
	APBD Murni	APBD Perubahan	APBD Murni	APBD Perubahan
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah.</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>5.000.000</b>	<b>2.176.000</b>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	3 dokumen	3.000.000	916.000



Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar SKPD	8 laporan	8 laporan	2.000.000	1.260.000
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>3.875.560.000</b>	<b>3.400.560.000</b>
Penyusunan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	3.838.000.000	3.363.000.000
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100%	100%	37.560.000	37.560.000
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>1.299.108.516</b>	<b>1.299.108.516</b>
Sosialisasi Peraturan perundang-Undangan	-	200 orang	1.299.108.516	1.299.108.516
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>337.177.000</b>	<b>658.677.000</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	100%	7.000.000	7.000.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	100%	355.000.000	331.500.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100%	100%	107.716.000	112.796.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100%	100%	16.402.000	16.402.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	100%	100%	27.760.000	27.760.000
Penyelenggaraan Rapat dan Konsultasi SKPD	100%	100%	109.600.000	163.219.000
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjangn Urusan Pemerintah daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>117.700.000</b>	<b>152.113.750</b>
Pengadaan Mebel	100%	100%	24.000.000	24.000.000

<b>Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>947.462.000</b>	<b>900.112.000</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	100%	3.000.000	3.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	100%	210.000.000	165.900.000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	100%	16.000.000	11.000.000
Penyedia Jasa Pelayanan Umum kantor	100%	100%	718.462.000	720.212.000
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjangn Urusan Pemerintah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>68.926.000</b>	<b>236.950.000</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%	100%	107.000.000	102.920.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	100%	20.500.000	11.600.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100%	100%	350.000.000	350.000.000
<b>Pengelolaan Informasi dan Komunkasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>945.000.000</b>	<b>1.235.000.000</b>
Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	100%	100%	475.000.000	465.000.000
Pelayanan Informasi Publik	200 orang 100% 100%	100%	240.000.000	390.000.000
Layanan Hubungan Media	50 media	50 media	180.000.000	330.000.000

Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	100%	5 badan publik	50.000.000	50.000.000
<b>Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>100%</b>	<b>3 titik lokasi</b>	<b>616.800.000</b>	<b>616.800.000</b>
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1. 3 OPD 2. 500 Mbps 2 titik lokasi	1. 3 OPD 2. 500 Mbps 2 titik lokasi	616.800.000	616.800.000
<b>Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>628.200.000</b>	<b>339.000.000</b>
Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	3 unit	3 unit	113.200.000	113.200.000
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintah Berbasis Elektronik	4 aplikasi	4 aplikasi	60.000.000	95.000.000
Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	1 buah	1 buah	35.000.000	35.000.000
Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	5 kali	5 kali	155.000.000	0.00
Pengembangan dan Pengelolaan Sumber daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	50 orang	50 orang	210.000.000	50.800.000
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE			90.000.000	80.000.000

<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>4 dokumen</b>	<b>35%</b>	<b>275.000.000</b>	<b>194.490.000</b>
Koordinasi dan Sinkronasi Pengumpulan, Pengelolaan, Analisis dan Desminasi Data Statistik Sektoral	4 dokumen	4 dokumen	115.000.000	97.430.000
Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang terintegrasi	5 OPD	5 OPD	160.000.000	97.060.000
<b>Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>19%</b>	<b>5 portal</b>	<b>126.000.000</b>	<b>93.500.000</b>
Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			40.000.000	10.000.000
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 unit	1 unit	50.000.000	57.500.000
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3 aplikasi	3 aplikasi	36.000.000	26.000.000

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2023

#### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya .

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
(1)	(2)	(3)
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	≥85 – 100%	Baik
3	≥65 – 85%	Cukup
4	≥50 – 65%	Kurang
5	Kurang dari 50%	Sangat Kurang

Pada Tahun 2023, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blora telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis (Renstra). Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Blora Tahun 2023 dan sasaran strategis yang harus diwujudkan sebagai berikut:

## 1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023

Untuk mengukur capaian kinerja dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja melalui indikator kinerja sasaran sebagai berikut :

Tujuan/ Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori	Sumber Data
Meningkatnya penerapan e-government	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,00	3,27	109 %	Sangat Baik	Dinkominfo
	Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	73	83,72	114%	Sangat Baik	Dinkominfo
	Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	5 portal	5 portal	100%	Baik	Dinkominfo
Meningkatnya Pengembangan Satu Data Blora	Persentase ketersediaan data pada portal satu data daerah	45%	58,12%	129%	Sangat Baik	Dinkominfo

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa :

- Target Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2023 adalah 3,00. Realisasinya adalah 3,27. Maka capaian kinerja yang diperoleh sebesar 109 % dengan predikat capaian **Sangat Baik**.
- Target skor Keterbukaan Informasi Publik (KIP) adalah 73. Realisasi tahun 2023 adalah 83,72. Maka capaian kinerja yang diperoleh sebesar 114% dengan predikat capaian **Sangat Baik**.

- c. Target Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah sebanyak 5 portal. Realisasinya adalah 5 portal. Maka capaian kinerja yang diperoleh sebesar 100% dengan predikat capaian **Baik**.
- d. Target ketersediaan data pada portal satu data daerah sebesar 45%. Realisasinya adalah 58,13%. Maka capaian kinerja yang diperoleh sebesar 129 % dengan predikat capaian **Sangat Baik**.

Faktor-Faktor Kunci Keberhasilan berdasarkan faktor internal dan eksternal dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Adanya komitmen bersama untuk mewujudkan visi misi Bupati Kabupaten Blora dan visi misi Dinas Komunikasi dan Informatika
2. Pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada secara maksimal
3. Pemanfaatan dana yang tersedia oleh pemerintah secara maksimal
4. Tersedianya jejaring kerja dan data yang akurat untuk terlaksananya perencanaan pembangunan partisipatif
5. Terlaksananya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik secara vertikal maupun horizontal, terutama dalam rangka memberi bimbingan, petunjuk, perintah maupun pengawasan tugas
6. Termanfaatkannya Renstra sebagai acuan untuk perencanaan lainnya.

**1. Perbandingan antara kinerja serta capaian kinerja tahun ini  
dengan tahun lalu 3 tahun terakhir**

Tabel 3.4

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2021			2022			2023		
		TAR GET	REA LISA SI	CAPAI AN %	TARG ET	REALI SASI	CAPAI AN %	TAR GET	REALI SASI	CAPAI AN %
Meningkat nya penerapan e- government	Indeks SPBE	2,86	2,80	97,90	2,96	2,36	79,7	3,00	3,27	109
	Nilai keterbukaan informasi publik	71	71	100	72	82,18	114,1	73	83,72	114,6
	Pengamanan informasi pemerintah daerah	5	5	100	5	5	100	5	5	100
Meningkat nya pengemba ngan satu data Blora	Persentase ketersediaan data pada portal satu data daerah	35	35	100	40	40	100	45	58,13	129

**2. Perbandingan Realisasi kinerja tahun 2023 terhadap target akhir 2026**

Tabel 3.5

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Capaian 2023	Target Akhir 2026	CAPAIAN (%)	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatnya penerapana sistem pemerintahan berbasis elektronik	Indeks SPBE	3,27	3,15	103,8	
1.1	Meningkatnya Penerapan e- government	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	83,72	81	103,3	
		Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	5	5	100	



1.2	Meningktanya Pengembangan Satu Data Blora	Persentase ketersediaan data pada portal satu data daerah	58,16	60	96,8	
-----	---	---	-------	----	------	--

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa :

- a. Realisasi capaian Target Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 masih dinamis. Apabila dibandingkan dengan target pada akhir RPJMD yang sebesar 3,15, maka capaian kinerja yang diperoleh pada Tahun 2023 sebesar 103,8% dengan predikat capaian **“Sangat Baik”**.
- b. Realisasi capaian Target skor Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 mengalami peningkatan. Apabila dibandingkan dengan target pada akhir Renstra yang sebesar 81, maka capaian kinerja yang diperoleh pada Tahun 2023 sebesar 103,3% dengan predikat capaian **“Sangat Baik”**.
- c. Realisasi capaian Target Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 stabil 100%. Apabila dibandingkan dengan target pada akhir Renstra yang sebanyak 5 portal, maka capaian kinerja yang diperoleh pada Tahun 2023 sebesar 100% dengan predikat capaian **“Baik”**.
- d. Realisasi capaian Target ketersediaan data pada portal satu data daerah dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 mengalami peningkatan. Apabila dibandingkan dengan target pada akhir Renstra yang sebesar 60%, maka capaian kinerja yang diperoleh pada Tahun 2023 sebesar 96,8% dengan predikat capaian **“Baik”**..

**3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Tabel 3.6

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	ANALISIS KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
1	Meningkatnya penerapan system pemerintahan berbasis elektronik	Indeks SPBE	3,00	3,27	103,8		
1.1	Meningkatnya penerapan e-government	Nilai keterbukaan informasi publik	73	83,72	103,3		
		Pengamanan informasi pemerintah daerah	5	5	100		
1.2	Meningkatnya pengembangan satu data Blora	Persentase ketersediaan data pada portal satu data daerah	45	58,13	129		

## 2. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.7

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN		
		Capaian 2023	Target 2026	Capaian (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
Meningkatnya penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Indeks SPBE	3,27	3,15	103,8	7.758.953.516	7.467.653.329	96
Meningkatnya Penerapan e-government	Nilai keterbukaan informasi publik	83,72	81	103,3	1.235.000.000	1.200.647.772	97
	Pengamanan informasi pemerintah daerah	5	5	100	93.500.000	87.613.600	94
Meningkatnya Pengembangan Satu Data Blora	Persentase ketersediaan data pada portal satu data daerah	58,13	60	96,9	194.490.000	192.745.992	99

### B. REALISASI ANGGARAN

Total Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blora tahun 2023 yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Blora adalah sebesar Rp. 8,544.000.000,00. Sedangkan total anggaran setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 9.227.943.516,00 atau bertambah sebesar Rp. 683.943.516,00 (7%). Hal tersebut dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 3.8 Perbandingan Anggaran Tahun 2023 Sebelum dan Setelah Perubahan

Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan(Rp)	Bertambah/ Berkurang(Rp)	%
Belanja Operasi	7.825.000.000	8.497.443.516	672.443.516	8
Belanja Modal	719.000.000	730.500.000	11.500.000	2
<b>Total Anggaran</b>	<b>8.544.000.000</b>	<b>9.227.943.516</b>	<b>683.943.516</b>	<b>7</b>

Rincian Penggunaan anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.9 Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blora Tahun 2023 dan Tahun 2024

PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	ANGGARAN 2024
<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>1.235.000.000</b>	<b>1.200.647.772</b>	<b>1.204.190.000</b>
<b>Pengelolaan Informasi dan Komunkasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.235.000.000</b>	<b>1.200.647.772</b>	<b>1.204.190.000</b>
Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	465.000.000	449.797.542	265.500.000
Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik			283.880.000
Pelayanan Informasi Publik	390.000.000	378.889.930	440.560.000
Layanan Hubungan Media	330.000.000	326.711.300	100.000.000
Penguatan Tata Kola Komisi Informasi di Daerah	50.000.000	45.249.000	35.000.000

<b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>955.800.000</b>	918.562.270	
<b>Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>616.800.000</b>	<b>616.798.000</b>	<b>616.800.000</b>
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	616.800.000	616.798.800	616.800.000
<b>Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>339.000.000</b>	<b>301.764.270</b>	<b>375.000.000</b>
Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	113.200.000	109.165.969	195.000.000
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintah Berbasis Elektronik	95.000.000	93.573.000	30.000.000
Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas			112.660.000
Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	50.800.000	29.697.578	20.000.000
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	80.000.000	69.327.723	17.340.000
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	<b>194.490.000</b>	<b>192.745.992</b>	<b>125.000.000</b>
<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>194.490.000</b>	<b>192.745.992</b>	<b>125.000.000</b>

Koordinasi dan Sinkronasi Pengumpulan, Pengelolaan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektor	97.430.000	97.346.000	65.000.000
Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	97.060.000	95.399.992	60.000.000
<b>PROGRAM PENYELENGGARAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	<b>93.500.000</b>	<b>98.504.000</b>	<b>130.000.000</b>
<b>Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>93.500.000</b>	<b>87.613.600</b>	<b>130.000.000</b>
Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000	8.573.000	
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	57.500.000	53.720.600	130.000.000
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	26.000.000	25.320.000	
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>6.749.153.516</b>	<b>6.549.090.259</b>	
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.</b>	<b>2.176.000</b>	<b>1.667.000</b>	<b>5.300.000</b>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	916.000	900.000	2.650.000
Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar SKPD	1.260.000	767.000	2.650.000

<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.400.560.000</b>	<b>3.388.583.359</b>	<b>4.731.560.000</b>
Penyusunan Gaji dan Tugangan ASN	3.363.000.000	3.351.863.359	4.700.000.000
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	37.560.000	36.720.000	31.560.000
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>1.299.108.516</b>	<b>1.233.770.100</b>	<b>400.000.000</b>
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1.299.108.516	1.233.770.100	400.000.000
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>658.677.000</b>	<b>616.693.178</b>	<b>986.016.000</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.000.000	7.000.000	10.420.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	331.500.000	326.887.500	599.020.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	112.796.000	99.748.000	161.159.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	16.402.000	16.107.250	24.337.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	27.760.000	27.410.000	21.080.000
Penyelenggaraan Rapat dan Konsultasi SKPD	163.219.000	139.540.428	170.000.000
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>24.000.000</b>	<b>23.920.500</b>	-
Pengadaan Mebel	24.000.000	23.920.500	-
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>900.112.000</b>	<b>847.045.071</b>	<b>858.074.000</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	2.451.000	3.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	165.900.000	159.727.267	218.400.000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.000.000	9.410.000	-
Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	720.212.000	675.456.804	636.674.000

<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>464.520.000</b>	<b>437.411.051</b>	<b>507.860.000</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	102.920.000	85.337.101	129.160.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.600.000	9.148.000	28.700.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	350.000.000	342.925.950	350.000.000
<b>Total Anggaran</b>	<b>9.227.943.516</b>	<b>8.948.660.693</b>	<b>9.339.800.000</b>

Berdasarkan pada tabel di atas, capaian “Meningkatnya penerapan e-government dan meningkatnya pengembangan Satu Data Blora” didukung melalui anggaran sebesar Rp. 9.227.943.516,00 dengan realisasi sebesar Rp. 8.948.660.693,00 atau 96,41%. Dari realisasi anggaran sebesar 96,41% apabila dibandingkan dengan rata – rata capaian sasaran sebesar 113%, maka **terdapat efisiensi** penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.



## **BAB IV PENUTUP**

### **A. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BLORA**

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blora Tahun 2023 merupakan pertanggungjawaban atas kinerja instansi pemerintah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blora Tahun 2021 – 2026 yang berisi uraian tentang capaian indikator kinerja kegiatan, program dan sasaran yang telah dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blora pada Tahun 2023.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blora sebagai SKPD teknis yang mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blora dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena hampir semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan kategori “**sangat baik**”. Hal tersebut didukung dengan data Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dicapai (113%)

Tabel 4.1

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Capaian 2023	CAPAIAN (%)	KATEGORI CAPAIAN
1	Meningkatnya penerapana sistem pemerintahan berbasis elektronik	Indeks SPBE	3,27	103,8	Sangat Baik
1.1	Meningkatnya Penerapan e-government	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	83,72	103,3	Sangat Baik
		Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	5	100	Baik
1.2	Meningktanya Pengembangan Satu Data Blora	Persentase ketersediaan data pada portal satu data daerah	58,13	129	Sangat Baik

## B. STRATEGI UNTUK PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATANG

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blora di masa mendatang antara lain:

1. Membuat rencana peningkatan kualitas dan pemberdayaan SDM dan Pengelola Anggaran secara optimal dalam pelayanan publik melalui peningkatan dan pemanfaatan sarana prasarana yang ada.
2. Mengoptimalkan pelaksanaan koordinasi antar OPD, antar lembaga non pemerintah, pemangku kepentingan dan masyarakat terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas dalam memperluas pemerataan pembangunan Sarana Prasarana Komunikasi dan Informatika.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blora. Semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/ kinerja yang akan datang.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Blora



**PRATIJKO NUGROHO, S.Sos, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19690617 199009 1 002